**ARTIKEL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEADILAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUKUM PERDATA NASIONAL**

***LEGAL PROTECTION OF EXECUTION AUCTION WINNER IN CIVIL CASE SETTLEMENT LINKED WITH PRINCIPLE OF JUSTICE IN THE NATIONAL CIVIL LAW DEVELOPMENT***

Disusun Oleh :

**Nama : Erlan Jaya Putra**

**NPM : 199030001**

****

**PROGAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2023**

**ABSTRAK**

Eksekusi pengadilan dalam perkara perdata pada saat ini belum sepenuhnya melindungi hak-hak para pihaknya hal ini yaitu dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan masih terdapat permasalahan hukum yaitu pelaksanaan lelang tersebut masih dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang lain atau pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya sehingga hal itu menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak khususnya bagi pihak pemenang lelang. Dalam penelitian ini mempertanyakan Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan sita eksekusi pengadilan di Indonesia, Bagaimana perlindungan hukum hak pemenang lelang eksekusi dalam penyelesaian sengketa Perdata dan Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi dalam sistem hukum perdata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis.

Hasil penelitian prosedur pelaksanaan lelang eksekusi di pengadilan dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi perdata dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas hukum acara perdata khususnya pada tahapan pelaksanaan putusan/eksekusi dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas keadilan didalamnya serta melibatkan institusi-institusi terkait seperti KPKNL dan POLRI. Perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang eksekusi yang ada saat ini belum dapat dikatakan bahwa pemenang lelang eksekusi mendapatkan perlindungan hukum secara mutlak atau dengan kata lain bahwa pemenang lelang eksekusi yang telah memenangkan objek dari lelang berdasarkan prosedur yang benar dan sah serta berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku masih saja dapat dibatalkan sehingga hal tersebut dapat merugikan pemenang lelang. Konsep perlindungan hukum bagi pemenang lelang perlu adanya suatu konsep pengaturan secara khusus yang diakomodir dalam suatu peraturan setingkat undang-undang (undang-undang khusus mengenai lelang) dapat melindungi hak-hak dari pemenang lelang, disamping itu juga bahwa dengan adanya suatu konsep perlindungan hukum yang diakomodir dalam suatu peraturan setingkat undang-undang sudah seharusnya bagi penegak hukum khususnya hakim yang menyidangkan dan memeriksa gugatan pembatalan lelang memiliki kesepakatan dan kesepemahaman bahwa dalam memutus gugatan pembatalan lelang harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut.

**Kata Kunci: Eksekusi, Lelang**

***ABSTRACT***

*Court executions in civil cases at this time have not fully protected the rights of the parties, this is in the implementation of auctions carried out based on court decisions there are still legal problems, namely the implementation of the auction can still be canceled by a decision of another court or a higher court so that it creates uncertainty and injustice for the parties, especially for the winning bidder. This study questions how the execution auction is carried out based on court execution confiscations in Indonesia, how is the legal protection of the rights of the winner of the execution auction in the settlement of civil disputes and how is the concept of legal protection for the winner of the execution auction in the civil law system.*

*The research method used in this research is analytical descriptive, namely research specifications that describe the problem under study, with a normative juridical approach, data obtained from secondary legal sources which are used as primary legal materials in the form of legislation, books, journals. The data obtained from field studies and document studies are then analyzed in a qualitative juridical manner, after the data has been collected it is then poured into a logical and systematic description without using mathematical formulas.*

*The results of the research on the procedure for implementing the execution auction in court, it can be said that the procedure for carrying out civil executions is carried out based on the principles of civil procedural law, especially at the stage of implementing decisions/executions and other applicable laws and regulations while still paying attention to the principles of justice in it and involving other institutions. Related institutions such as KPKNL and POLRI. The current legal protection of the rights of the winners of the execution auction cannot be said that the winner of the execution auction gets absolute legal protection or in other words that the winner of the execution auction who has won the object of the auction is based on correct and legal procedures and based on legal provisions. Valid, can still be canceled so that it can harm the auction winner. The concept of legal protection for the auction winner needs a special regulatory concept that is accommodated in a law-level regulation (special law on auctions) to protect the rights of the auction winner, besides that with the existence of a legal protection concept that accommodated in a law-level regulation, law enforcers, especially judges who hear and examine auction cancellation claims, have an agreement and understanding that in deciding the auction cancellation lawsuit must refer to the existing statutory regulations so that there is no reason for the judge not to heed these laws and regulations.*

*.*

***Keywords: Execution, Auction***